

Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Indonesia

Nurlina¹, Zurjani²

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

¹email: nurlina@unsam.ac.id

²email: Zuljani000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak Indonesia, tingkat suku bunga (BI Rate) dan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2003-2017 yang diperoleh dari situs BPS Indonesia, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh $Y = 3,501 + 0,432X_1 + 0,286X_2$. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 4,52 atau sebesar 45,2% artinya variabel penerimaan pajak dan suku bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 54,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji t pada variabel penerimaan pajak nilai Prob > α 5% ($0,027 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada variabel suku bunga nilai Prob > α 5% ($0,041 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hasil uji F nilai prob (F statistik) < α 5% ($0,021 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa secara simultan penerimaan pajak dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB)

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro, di samping kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner kebijakan fiskal dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada

untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh (*full-employment level of income*). Sebaliknya dalam kondisi overheating akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif melalui penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pendapatan pajak untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau tingkat bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, perekonomian yang stabil lebih

diinginkan dibandingkan perekonomian yang mengalami gejolak.

Kestabilan menjadi penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha. Stabilitas makroekonomi dapat dilihat dari dampak guncangan suatu variabel makroekonomi terhadap variabel makroekonomi lainnya. Apabila dampak suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel makroekonomi dan diperlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai keseimbangan jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa stabilitas makroekonomi rentan terhadap perubahan.

Kebijakan moneter adalah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Stabilisasi ekonomi dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi

kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan ekonomi negara tersebut.

Salah satu kebijakan fiskal yaitu berkaitan dengan pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Salah satu kebijakan moneter yaitu berkaitan dengan suku bunga. Tingkat bunga digunakan untuk menstabilkan jumlah uang beredar pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian semakin bergairah. Semakin tinggi tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin bertambah. Tingkat bunga dalam hal ini adalah BI Rate. Dengan menurunkan BI Rate bank sentral dapat melakukan ekspansi atau kontraksi moneter. Pada Tabel I terlihat data mengenai penerimaan pajak dan suku bunga di Indonesia pada tahun 2012-2017.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto, Penerimaan Pajak dan Suku Bunga di Indonesia Tahun 2012-2017

Tahun	PDB (miliar rupiah)	Perkembangan n (%)	Penerimaan Pajak (miliar rupiah)	Perkembangan n (%)	BI Rate (%)
2012	2.618,9	-	1.016.237	15,65	5,75
2013	2.770,3	5,78	1.148.365	13,00	7,50
2014	2.991,6	7,98	1.246.107	8,51	7,75
2015	3.134,8	4,78	1.489.255	19,51	7,50
2016	3.328,2	6,16	1.539.166	3,35	6,50
2017	3.551,4	6,73	1.495.893	-2,81	6,50

Sumber: BPS Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia (diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel I-2 dijelaskan bahwa PDB pada tahun 2015 meningkat 4,78 persen atau lebih rendah dari tahun lainnya selama periode 2012-2017. Di tahun yang sama penerimaan pajak meningkat 8,15 persen, sedangkan suku bunga meningkat menjadi 7,50 persen. Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi

ekonomi suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi cukup lazim digunakan. Gambaran kondisi perekonomian dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro ekonomi suatu negara. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat

digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara.

Penerimaan pajak selama pada tahun 2015 cukup signifikan hingga mencapai 19,51 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh pos penerimaan, terutama pos penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, dan cukai. Faktor utama yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan sebagai hasil dari kegiatan modernisasi administrasi di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Sedangkan tingkat suku bunga tertinggi yaitu pada tahun 2014 yaitu mencapai 7,75%, sedangkan tingkat suku bunga terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,75%. Fluktuasi BI Rate dalam beberapa tahun terakhir disebabkan karena alasan pihak Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan menyikapi lonjakan inflasi.

Dari uraian latar belakang, tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pajak dan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia

Kebijakan Fiskal

Menurut Ibrahim (2013:193), kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015:137).

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim (2013:194), yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Secara operasional, konsolidasi fiskal (penyehatan APBN) diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Nizar, 2010:114)

1. Peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum.
3. Pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah.
4. Perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
5. Pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara. Sementara itu, penguatan stimulus fiskal terutama diupayakan melalui optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, alokasi belanja negara untuk kegiatan-kegiatan dan sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif fiskal (perpajakan).

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang, akan ditandai dengan

meningkatnya harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian (Pohan, 2008:14).

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen yaitu: (Wijoyo, 2007:111)

1. Operasi pasar terbuka (*Open market operation*),
2. Penentuan tingkat bunga (*Discount rate policy*),
3. Penentuan cadangan wajib (*Reserve requirements policy*)
4. Himbauan moral (moral persuasion).

Operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Sentral. Dalam kaitan ini penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan mempunyai dampak kontraksi moneter karena pengurangan alat-alat likuid perbankan yang akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Sebaliknya pembelian surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan membawa dampak ekspansi moneter karena peningkatan alat-alat likuid bank-bank yang akan memperbesar kemampuannya dalam pemberian pinjaman. OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesai (SBI) dan intervensi rupiah melalui Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI). Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sementara itu, kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Sentral untuk menyesuaikan kondisi pasar uang baik likuiditas maupun tingkat suku bunga (Mishkin, 2007:89).

Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman Bank Sentral kepada bank-bank. Dengan menetapkan tingkat diskonto yang tinggi diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari Bank Sentral yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya penetapan tingkat diskonto yang

rendah akan meningkatkan permintaan pinjaman Bank Sentral yang selanjutnya akan menambah jumlah uang beredar (Pohan, 2008:15).

Sebaliknya pembelian valuta asing oleh Bank Sentral akan meningkatkan likuiditas rupiah di pasar uang (Wijoyo, 2007:112).

Indikator dan Orientasi Kebijakan Moneter yaitu: (Pohan, 2008:15)

1. Tingkat suku bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut, dan begitu sebaliknya.

2. Uang beredar

Kebijakan moneter yang menggunakan *monetary aggregate* atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan.

Kebijakan Fiskal berkaitan dengan Pajak

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggara- rakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2008:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Sukardji (2008:1), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
4. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Sukardji, 2008:4) :

1. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Moneter Berkaitan dengan Suku Bunga

Menurut Maryanne (2009:82) tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, atas perjanjian pembayaran kembali, yang dinyatakan dalam persentase yang ditetapkan Bank Indonesia dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia.

Nanga (2007:71) menjelaskan bahwa kebijakan tingkat suku bunga merupakan kebijakan moneter yang diputuskan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perbankan. Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung. Tetapi dilain pihak, bunga juga dapat merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya (Samuelson, 2007:207).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Sukirno (2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu : (Sukirno, 2006:132-137).

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo-Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*enterpreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah

Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya (Ibrahim, 2012:2012).

Pengaruh Suku Bunga terhadap Perekonomian

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah.

Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uang lain, dan pada akhirnya seluruh komponen tersebut akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara (Nanga, 2007:84).

Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikaitkan dengan telaah teoritis dan empiris terdahulu, dua hipotesis diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis pertama adalah suku bunga dan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hipotesis kedua adalah suku bunga dan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi hanya mencakup variable perkembangan pajak, suku bunga, dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Penelitian dilakukan dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2003-2017.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif data kualitatif.

Metode pengumpulan data, yaitu: menggunakan penelitian kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data dengan membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan variabel penelitian; dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan cara untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada sampel yang telah dipilih. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara dengan menelaah dokumen yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model

ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda (Gujarati, 2005).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak (X1), suku bunga (X2), variabel dependen adalah perekonomian Indonesia (Y). Proses analisis data menggunakan program SPSS versi 20,0.

Pengaruh pajak dan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia dapat diketahui dari hasil analisis data. Analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda yang dihitung dengan menggunakan program statistik SPSS versi 20,0. Diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

HASIL ANALISIS

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.501	1.9182		3.019	.000
Pajak	.432	.028	.099	2.650	.027
Suku Bunga	.286	.122	.317	2.411	.041
2 R	.488 ^a				
R Square	.452				
Adjusted R Square	.404				
Std. Error of the Estimate	1.2881				

Sumber: Output SPSS (2018)

Tabel 3. Hasil ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225.382	3	344.175	6.211	.021 ^a
	Residual	.703	11	3.271		
	Total	.2899	14			

Sumber: Output SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 2 maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,501 + 0,432X1 + 0,286X2.$$

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,501 menunjukkan bahwa jika pajak dan suku bunga tetap, maka perekonomian Indonesia sebesar 4,062%.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R Square) dari persamaan simultan adalah 0,452 atau sebesar

45,2%, yang berarti bahwa kemampuan variabel penerimaan pajak dan variabel tingkat suku bunga berpengaruh secara simultan sebesar 45,2% terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 54,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Nilai Prob. (F-statistic) dari hasil estimasi sebesar 0,021, artinya nilai Prob. (F-statistic) lebih kecil dari nilai α ($0,021 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak dan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia.

Uji t (Parsial)

Hasil estimasi koefisien variabel penerimaan pajak (X_1) sebesar 0,432, artinya jika terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 1%, maka perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 0,432%, *ceteris paribus*. Variabel penerimaan pajak (X_1) nilai signifikan sebesar 0,027 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,027 < 0,05$), artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerimaan pajak terhadap perekonomian Indonesia.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2013) "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", yang mengatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil estimasi koefisien variabel tingkat suku bunga (X_2) sebesar 0,286, artinya jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1%, maka perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 0,286%, *ceteris paribus*. Variabel tingkat suku bunga (X_2) nilai signifikan sebesar 0,041 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,041 < 0,05$) artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat suku bunga terhadap perekonomian Indonesia.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) "Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerimaan Pajak (X_1) terhadap Perekonomian Indonesia

Hasil estimasi koefisien variabel penerimaan pajak di Indonesia diperoleh nilai signifikan sebesar 0,027. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak memiliki tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel penerimaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, koefisien regresinya menunjukkan nilai positif. Artinya apabila terjadi peningkatan penerimaan pajak maka akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, diterima.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak di suatu negara. Sebaliknya tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak investasi melaju, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan negara membesar.

Pengaruh Suku Bunga (X_2) terhadap Perekonomian Indonesia.

Hasil estimasi koefisien variabel tingkat suku bunga di Indonesia diperoleh nilai signifikan sebesar 0,041. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga memiliki tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel tingkat suku bunga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari koefisien regresinya juga menunjukkan nilai positif. Artinya apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga maka akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, diterima

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, diharapkan akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna meningkatkan produksi dan

menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan Rupiah terhadap mata uang lain, dan pada akhirnya seluruh komponen tersebut akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara.

Pengaruh Penerimaan Pajak (X1) dan Suku Bunga (X2) terhadap Perekonomian Indonesia

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai signifikan variabel penerimaan pajak dan tingkat suku bunga sebesar 0,021. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak dan variabel tingkat suku bunga memiliki tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Artinya secara bersama-sama (simultan) variabel penerimaan pajak dan variabel tingkat suku bunga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, diterima.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*Entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu

negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi, sehingga produksi agregat juga akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh, dinyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
2. Secara parsial tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
3. Secara simultan penerimaan pajak dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gulo.2012. Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**. Vol.1.No.1.Hal 1-21
- Ibrahim, Muhammad. 2013. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta : Bumi Aksara
- Izza, Nurul, 2012. Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga dan pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. **Jurnal Ekonomi**.Vol.1.No.1.Hal.1-121
- Mahdi.2013. Pengaruh Kebijkana Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jambi. **Jurnal Ekonomi**.Vol.1.N0.1.Hal-15
- Mardiasmo, 2008. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Andi Offest. Yogyakarta
- Maryanne. 2009. **Ekonomi Makro**. Jakarta : Salemba Empat
- Nanga, Muana. 2007. **Makroe Ekonomi**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nasution, Mulia.2006. Teori Ekonomi Makro. Depok; Djambatan
- Nizar. 2010. Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Samuelson, Nordhaus. 2007. **Ilmu Ekonomi Makro**. Edisi Tujuh Belas. Jakarta: Media Global Edukasi

- Setiawan, Iwan. 2009. Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia. **Jurnal, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi**. Vol.1.No.1.Hal 15-31
- Sirait, Yani.2013. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**. Vol.2.No.1.Hal.15-31
- Sugioyono.2011. **Statistika untuk Penelitian**. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2006. Makroe Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba